

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 07
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 12 September 2018
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas RKA-K/L Tahun 2019 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi
Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 39 Anggota dari 46 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP. (Menteri Pertanian);
2. Justan Ridwan Siahaan, AK.MACC,CA. (Inspektur Jenderal);
3. Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);
4. Dr. Ir. H. Sumarjo Gatot Irianto, M.S, D.A.A. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan);
5. Ir. Bambang, MM. (Direktur Jenderal Perkebunan);
6. Drh. I Ketut Diarmita, MP. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
7. Dr. Ir. Suwandi (Direktur Jenderal Hortikultura);
8. Ir. Bambang, MM. (Direktur Jenderal Perkebunan);
9. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan);
10. Dr. Ir. Momon Rusmono, MS. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian);
11. Dr. Ir. Muhammad Syakir, MS. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian); dan
12. Ir. Banun Harpini, M.Sc. (Kepala Badan Karantina Pertanian) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dalam rangka membahas RKA-K/L Tahun 2019 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan Pagu APBN Kementerian Pertanian Tahun 2019 sebesar Rp21.686.516.683.000,00 yang bersumber dari:
 - a. Rupiah Murni sebesar Rp21.351.132.813.000,00;
 - b. Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp60.830.000.000,00;
 - c. Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp164.693.870.000,00; dan
 - d. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp109.860.000.000,00.dengan komposisi program per-eselon I sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.434.152.891.000,00;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp94.408.464.000,00;
 - c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp6.012.019.254.000,00;
 - d. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.038.378.419.000,00;
 - e. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1.114.218.315.000,00;
 - f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.953.121.296.000,00;
 - g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp5.127.538.742.000,00;
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp1.805.476.595.000,00;
 - i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp1.585.698.560.000,00;
 - j. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp668.688.925.000,00; dan
 - k. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp852.815.222.000,00.Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama Eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2 triliun yang terdiri dari DAK Provinsi sebesar Rp450 miliar,- dan DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp1,55 triliun. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman untuk membahas kriteria teknis DAK dan alokasi perdaerah.
3. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan Pagu Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2019 sebanyak 9.550.000 ton atau setara dengan Rp29.503.224.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Urea sebanyak 4.100.000 ton atau setara dengan Rp13.689.465.400.000,00;
 - b. SP-36 sebanyak 850.000 ton atau setara dengan Rp2.570.275.900.000,00;
 - c. ZA sebanyak 1.050.000 ton atau setara dengan Rp1.801.070.250.000,00;
 - d. NPK sebanyak 2.550.000 ton atau setara dengan Rp9.887.357.250.000,00; dan
 - e. Pupuk Organik sebanyak 1.000.000 ton atau setara dengan Rp1.555.056.000.000,00.Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mendata penerima pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk tahun 2015 sebesar Rp5.045.329.128.458,00, tahun 2016 sebesar Rp2.939.751.206.345,00, dan tahun 2017 sebesar Rp1.833.249.604.468,00.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk memulihkan sektor pertanian secara menyeluruh yang terdampak gempa bumi di Lombok.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Edhy Prabowo, MM., MBA.
A-335

